

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN RAWA MAKMUR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Amanda Rizky Santoso¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambatnya pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

Metode Penelitian ini yaitu pada jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan: Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat, Mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan, Perencanaan kegiatan pembangunan partisipatif dan terpadu, Menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan, Menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap adanya perubahan menuju kearah kemajuan dan faktor mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pelaksanaan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Diketahui bahwa pelaksanaan fungsi LPM belum berjalan dengan baik ini di buktikan dengan permasalahan pembangunan yang belum merata dan kurangnya upaya LPM dalam menggerakkan gotong royong serta swadaya masyarakat dalam pembangunan dan bukti tersebut di dukung dari pernyataan pihak yang terkait.

Kata Kunci : Fungsi LPM, Pembangunan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : amandabernadette@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses baik usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat dalam mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya demi kemajuan nasional. Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik, namun juga non fisik. Pembangunan fisik yaitu pembangunan yang dapat di lihat hasilnya secara nyata, seperti bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan nonfisik merupakan pembangunan sumber daya manusia dengan memberdayakan masyarakat melalui status pemulihan ekonomi masyarakat.

Seperti yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dapat dimaksudkan diatas bahwa pemerintah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan memberdayakan masyarakatnya sendiri secara menyeluruh baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara cepat, adil dan merata. Namun pada kenyataannya dalam permasalahan pembangunan di daerah sendiri, Pemerintah Daerah cenderung memiliki ketergantungan tinggi terhadap Pemerintah Pusat hingga dengan sendirinya menghilangkan kemandirian daerah sendiri yaitu dengan sebutan daerah otonom. Ini dibuktikan dengan sumber energi berupa dana dan sumber daya manusia yang terampil yang hampir seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat. Bahkan hingga pembuatan dan penetapan kebijakan daerah harus melalui campur tangan Pemerintah Pusat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alternatif bagi daerah dalam menggantikan sumber daya manusia yang terampil dari pusat namun juga sebagai faktor utama keberhasilan dalam pembangunan. Masyarakat dibuat untuk menjadi mandiri dan mampu menguasai sumber daya yang ada hingga dapat ikut terlibat dalam pembuatan dan penetapan keputusan secara politis. Aspirasi masyarakat sangat diperlukan sebagai acuan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan agar tepat sasaran sesuai dengan permasalahan, kebutuhan dan keinginan yang terjadi di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur, dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam

pelaksanaan pembangunan, maka LPM memiliki fungsi sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pasal 5 yaitu:

1. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat.
3. Mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan.
4. Perencanaan kegiatan pembangunan partisipatif dan terpadu.
5. Menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan.
6. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap adanya perubahan menuju kearah kemajuan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan mengenai pelaksanaan fungsi LPM sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2004 dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur, terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur. Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu masih banyaknya pembangunan di beberapa wilayah yang belum terlaksana dan terselesaikan dengan baik, seperti permasalahan yang terjadi yaitu beberapa jalan yang belum di semenisasi dan menyulitkan warga dalam melakukan aktivitas mereka di luar rumah dikala musim hujan, beberapa wilayah yang tidak memiliki drainase yang baik yang mana di kala musim hujan dapat menyebabkan banjir, dan jembatan yang rusak. Kemudian kurangnya upaya LPM dalam menggerakkan swadaya masyarakat untuk pembangunan di Kelurahan yang mana hanya mengandalkan dana dari Pemerintah Kota. Suksesnya pembangunan di Kelurahan berasal dari masyarakat itu sendiri, namun peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangatlah penting, karena LPM dibentuk sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat dengan mengarahkan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan serta menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat ke pemerintah yaitu Kelurahan.

Oleh sebab itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda” untuk mengetahui penyebab dari permasalahan pembangunan yang terjadi di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan semoga dapat menjadi bahan masukan bagi LPM Kelurahan Rawa Makmur agar pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur dapat terlaksana dengan baik melalui campur tangan pemerintah dengan masyarakat serta seluruh anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.

Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi LPM dalam melaksanakan fungsinya untuk pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi LPM di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi LPM di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.

Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, diharapkan mampu mempraktekkan ilmu pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah serta membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa untuk berfikir secara kritis dan ilmiah dengan melakukan penelitian.
3. Dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsinya terhadap pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.

KERANGKA DASAR TEORI

Pelaksanaan

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2008:68) berpendapat bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Organisasi dan Manajemen

Menurut Thoha dalam Patton (2006:1) organisasi sebagai suatu sistem sosial terdiri dari beberapa elemen atau unsur yang memiliki perbedaan (diferensiasi) namun dari perbedaan-perbedaan yang ada justru mengharuskan adanya saling interaksi dan interdependen. Sedangkan didalam suatu organisasi terdapat manajemen sebagai fungsinya dalam mengatur suatu organisasi agar dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Follet dalam Herlambang (2013:3) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang

lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses menetapkan suatu tujuan dengan berbagai alternatif yang ada agar tujuan tersebut dapat tercapai di masa yang akan datang. Perencanaan diperlukan agar pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya strategi-strategi di setiap kegiatan pencapaian tujuan.

Perencanaan menurut Tarigan (2005:1) merupakan menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Administrasi Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan dan kemajuan taraf hidup masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya ke arah yang lebih baik lagi. Pembangunan dilaksanakan sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita serta harapan masyarakat dimasa sekarang maupun yang akan datang.

Nugroho dan Dahuri (2004:9) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Pemberdayaan Masyarakat

Ife dalam Zubaedi (2013:74-75) mengartikan pemberdayaan yaitu memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

Partisipasi Masyarakat

Terdapat beberapa pengertian lain mengenai definisi partisipasi masyarakat. Seperti menurut Anwas (2013:93) partisipasi masyarakat merupakan suatu proses dan tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Dengan partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Adapun tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 Pasal 4 yaitu:

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan meaksanakan pembangunan.

2. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan bergotong royong.
3. Menampung dan mengolah semua bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan.
4. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat.
5. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri.
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
7. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
8. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
9. Membina kerja sama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional berdasarkan teori-teori yang di gunakan dalam penelitian, maka Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dalam pembangunan yaitu kerjasama yang dilakukan oleh seluruh anggota LPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan dengan cara yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 11 tahun 2004 agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera serta secara adil dan makmur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran sesuai yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 yaitu :
 - a. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat.
 - c. Mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan.
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan partisipatif dan terpadu.
 - e. Menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan.

- f. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap adanya perubahan menuju kearah kemajuan.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi LPM sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2004 dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.

Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan yaitu :

- a. Informan kunci yaitu Ketua LPM dan Lurah Rawa Makmur.
- b. Informannya yaitu Ketua RT Kelurahan Rawa Makmur, yang ditentukan secara *purposive sampling*.
- c. Informan lainnya yaitu masyarakat yang ditentukan dengan cara *accidental sampling*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang ada di kantor LPM dan Kelurahan Rawa Makmur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu observasi dan wawancara (*interview*).

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif sehingga datanya sudah jenuh., yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penyimpulan / Verifikasi (*Conclusions : Drawing / Verifying*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda

Sesuai dengan Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, maka

pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur dalam pelaksanaan pembangunan yaitu :

Menanamkan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Fungsi LPM Kelurahan Rawa Makmur dalam upaya menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat sudah cukup baik itu di lakukan dengan kegiatan sosialisasi di beberapa RT dan mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan untuk bersama-sama mengarahkan masyarakat dengan melindungi lingkungan mereka dari bahaya terorisme dan narkoba yang mana semua itu berasal dari luar yaitu pendatang-pendatang yang tidak lapor RT dengan kegiatannya yaitu siskamling.

LPM Kelurahan Rawa Makmur tidak hanya sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur, namun juga dapat berfungsi dalam bidang sosial yaitu dengan menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kelurahan dengan bersama-sama mengajak masyarakat di Kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan kegiatan siskamling, meskipun kegiatan tersebut tidak terlaksana di beberapa RT karena jadwal kerja masyarakat yang berbenturan dengan jadwal giliran kegiatan ronda malam (siskamling).

Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan yang bersumber dari Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya dalam bentuk sumbangan tenaga dan pemikiran namun juga pembuatan keputusan secara politis tanpa ada unsur paksaan dari pemerintah. Seperti yang di kemukakan oleh Choen dan Upholff dalam Mulyadi (2009:26) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah keikut sertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan.

Cara LPM dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat yaitu dengan mengadakan kegiatan musrenbang yang mana kegiatan tersebut di lakukan dengan mengumpulkan semua RT yang telah memiliki usulan-usulan untuk di musyawarahkan dalam kegiatan musrenbang nanti.

LPM Kelurahan Rawa Makmur kurang menjalankan fungsinya dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat. Hal ini di buktikan dari pernyataan langsung Ketua RT yang memberikan pernyataannya bahwa LPM tidak seberapa membantu dalam pembangunan di wilayah mereka dan masyarakat memiliki inisiatif sendiri untuk berswadaya dalam membangun di wilayah mereka, dan tidak ada binaan sama sekali dari LPM dalam hal menggerakkan swadaya masyarakat. Padahal sangat jelas salah satu fungsi LPM yang telah di tetapkan dalam Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 pada pasal 5 yaitu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat. Karena

swadaya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.

Mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan

Organisasi sebagaimana yang telah di kemukakan Thoha dalam Patton (2006:1) bahwa organisasi merupakan organisasi sebagai suatu sistem sosial terdiri dari beberapa elemen atau unsur yang memiliki perbedaan (diferensiasi) namun dari perbedaan-perbedaan yang ada justru mengharuskan adanya saling interaksi dan interdependen. Maka dalam Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan hendaknya saling bekerja sama dalam mencapai satu tujuan yaitu membangun dan memberdayakan masyarakat di Kelurahan. Seperti pendapat Margono dalam Anwas (2013:95) bahwa salah satu cara meningkatkan partisipasi dalam masyarakat adalah perlunya di tumbuhkan lembaga-lembaga non formal yang ada di masyarakat. Lembaga non formal tersebut adalah majelis taklim, Karang taruna, Posyandu, Posdaya, PAUD, organisasi Kemasyarakatan dan bentuk lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di peroleh penulis bahwa terdapat perbedaan pernyataan antara Lurah dengan Ketua LPM. Ini di buktikan dari pernyataan Lurah Rawa Makmur bahwa LPM masuk dalam garis struktur organisasi maupun forum-forum yang ada di Kelurahan sebagai penasihat terkecuali PKK yang berdiri sendiri namun dalam hal kegiatan PKK, LPM turut serta di libatkan dalam kegiatan tersebut. Tetapi dari pernyataan Ketua LPM sendiri bahwa LPM tidak ikut dalam organisasi-organisasi tersebut dan organisasi-organisasi di Kelurahan berjalan dengan sendiri tanpa melibatkan LPM di dalamnya. Seharusnya telah jelas di tegaskan salah satu fungsi LPM dalam Perda Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2004 yaitu mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan, organisasi tersebut yaitu organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Kelurahan sendiri untuk membantu Kelurahan untuk mencapai tujuan yaitu membangun dan memberdayakan masyarakat di Kelurahan.

Perencanaan Kegiatan Pembangunan secara Partisipatif dan Terpadu

Perencanaan merupakan proses menetapkan suatu tujuan dengan berbagai alternatif yang ada agar tujuan tersebut dapat tercapai di masa yang akan datang. Perencanaan kegiatan pembangunan menurut Kunarjo dalam Kuncoro (2004:57), bahwa untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan di tempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas, inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Maka berdasarkan hasil yang di peroleh peneliti, bahwa dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang di lakukan oleh LPM yaitu mulai dari musrenbang hingga mengajukan proposal melalui jalur-jalur khusus seperti LPM. Meskipun terdapat permasalahan yang belum terselesaikan seperti keluhan warga Kelurahan Rawa Makmur yang mana wilayahnya masih sebagian belum di semenisasi sehingga menyulitkan warga dalam berkatifitas. Padahal 300 usulan telah masuk di Kelurahan, namun dari

pihak Kelurahan hanya menjadikan 10 skala prioritas di dalam usulan perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah yang masuk dalam 10 skala prioritas tersebut karena terbatasnya dana yang di peroleh dari pihak Kelurahan Rawa Makmur.

Sebanyak 300 usulan tidak mampu untuk di tangani dari pihak Kelurahan sehingga di buat 10 skala prioritas yang mana wilayah-wilayah tersebut pantas untuk di prioritaskan, maka akibat hal tersebut menyebabkan keluhan dari warga akan pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang belum di semenisasi selama tiga tahun yang menyulitkan aktifitas warga.

Menggali Pemanfaatan Sumber daya serta Potensi yang ada untuk Kepentingan Pembangunan yang ada di Kelurahan

Dalam hal menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yaitu sumber daya dari masyarakat sendiri serta memanfaatkan potensi yang ada dengan memanfaatkan potensi yaitu perusahaan swasta yang berdiri di tengah pemukiman warga dan itu semua bagian dari fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengupayakan pembangunan di wilayah Kelurahan. Maka keterlibatan LPM dalam pembangunan di Kelurahan sangat penting terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang mana sebagai sumber daya alternatif dalam pembangunan di kelurahan. Seperti yang di kemukakan Suhendra (2006:86) menyebutkan terdapat lima indikator masyarakat yang berdaya dengan salah satunya yaitu mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, bahwa upaya LPM dalam menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yaitu masyarakat sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada yaitu perusahaan swasta yang berdiri di tengah pemukiman warga yang selanjutnya oleh LPM dilakukan tindakan yaitu mengajukan proposal permohonan bantuan pembangunan di kelurahan dalam bentuk material tidak berupa dana.

Menumbuh Kembangkan Kemampuan dan Kemauan Masyarakat Terhadap adanya perubahan Menuju ke Arah Pembangunan

Perlunya menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap adanya perubahan menuju ke arah pembangunan sebagai upaya agar masyarakat dapat hidup secara mandiri untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti yang di kemukakan oleh Anwas (2013:93) bahwa dengan partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Namun pelaksanaan partisipasi masyarakat mulai memudar, seperti kegiatan gotong royong yang sudah mulai memudar hal itu jadi tanggung jawab LPM dan bersama dalam menumbuh kembangkan kemauan masyarakat untuk bergotong royong membangun di lingkungan mereka. Kemudian,

selanjutnya adalah memberdayakan masyarakat dengan pembangunan ekonomi (non fisik) untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri. Maka dalam hal ini, LPM kelurahan Rawa Makmur sudah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu di buktikan dengan mendata ibu-ibu penjual gorengan yang mana dari pihak LPM mengajukan proposal permohonan dana maupun alat memasak dari Dinas Sosial. Tidak hanya itu namun juga pembangunan ekonomi lainnya dengan adanya organisasi Kelurahan yaitu Kelompok Tani dalam bidang pertanian padi dan sayuran dan Karang Taruna dengan jenis usaha budidaya lele yang mana pihak LPM terlibat di dalam struktur organisasi tersebut sebagai penasihat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Raawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda

Faktor Pendukung

1. Sumber bantuan dan swadaya untuk pembangunan tidak hanya berasal dari pemerintah saja namun juga berasal dari pihak swasta yang mendirikan perusahaan di wilayah Kelurahan Rawa Makmur, sehingga LPM dapat meminta bantuan dengan mengajukan proposal kepada pihak swasta tersebut.
2. Pihak LPM memiliki kerabat atau kenalan di komisi tiga hingga ke tingkat Provinsi sehingga LPM dapat dengan mudah mengajukan proposal untuk permohonan bantuan dana untuk pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur.

Faktor Penghambat

1. Terbatasnya dana yang di peroleh yang membuat pembangunan infrastruktur di Kelurahan tidak teratasi secara tuntas.
2. Kantor Sekretariat LPM yang sudah tidak layak serta tidak adanya fasilitas pendukung seperti komputer, printer dan fasilitas pendukung lainnya yang menyebabkan LPM Kelurahan Rawa Makmur tidak melaksanakan fungsinya sebagai mana mestinya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda sesuai dengan Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 yaitu:
 1. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; dari fungsi LPM yang pertama yaitu menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat sudah cukup baik, ini di lihat dari upaya LPM dalam hal keamanan lingkungan melalui kegiatan mendatangi beberapa RT serta mengundang beberapa tokoh masyarakat yang ada di setiap RT di Kelurahan Rawa Makmur untuk memberikan binaan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi lingkungan dari bahaya terorisme dan narkoba yang mana itu berasal dari

- pendatang luar yang tidak wajib lapor RT untuk memasuki wilayah tersebut.
2. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat; fungsi LPM selanjutnya yaitu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat, di sini belum cukup terlaksana dengan baik, ini di buktikan yaitu LPM jarang terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong, terutama menswadayakan masyarakat di beberapa RT yang mana wilayah mereka masih butuh banyaknya pelaksanaan pembangunan. Mereka berjalan sendiri dalam kegiatan pembangunan di wilayah mereka bersama dengan RT dan tidak adanya binaan dari LPM.
 3. Mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan: fungsi LPM dalam mengkoordinasikan organisasi yang ada di Kelurahan belum berjalan dengan baik ini dibuktikan dari pernyataan Ketua LPM dengan tidak terlibat dalam organisasi-organisasi yang ada di Kelurahan. Padahal sangat jelas bahwa fungsi LPM seueai dalam Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2004 yaitu mengkoordinasikan lembaga/organisasi yang ada di Kelurahan agar organisasi-organisasi Kelurahan dapat berjalan sebagai mana mestinya untuk kepentingan pembangunan dan memberdayakan masyarakat di Kelurahan.
 4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu. Fungsi LPM dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu sudah cukup terlaksana dengan baik ini di buktikan dengan LPM mengumpulkan seluruh RT untuk menyampaikan usulan-usulan dalam kegiatan musrenbang, mengusahakan agar pembangunan dapat segera terlaksana dengan pengajuan proposal mulai dari pihak swasta hingga ke tingkat satu yaitu tingkat provinsi.
 5. Menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan Upaya LPM dalam hal menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan yang ada di Kelurahan yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang merupakan masyarakat sendiri untuk bersama-sama bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka. Adapun bantuan yang didapat yaitu dari pihak swasta yang terjun langsung dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan maupun upaya LPM yang mana sebelumnya telah mengajukan proposal untuk meminta bantuan dari pihak swasta berupa material untuk pelaksanaan perbaikan baik jalan maupun drainase yang ada di Kelurahan.
 6. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap adanya perubahan menuju ke arah pembangunan. Fungsi LPM dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik sudah cukup baik, ini di buktikan dari upaya LPM dalam pembangunan perekonomian di masyarakat Rawa Makmur yaitu dengan pendataan ibu-ibu atau penjual gorengan yang kemudian di usulkan ke dinas sosial untuk permohonan

bantuan baik berupa tambahan modal hingga peralatan memasak. Tidak hanya itu LPM juga bekerja sama dalam kegiatan usaha kecil menengah dengan beberapa organisasi di Kelurahan seperti Karang Taruna dalam usaha budidaya lele kemudian Kelompok Tani dalam usahanya yang tidak hanya menanam padi namun menanam sayur sayuran, dari semua kegiatan tersebut dapat menghasilkan *income* bagi para anggotanya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur yaitu:
 1. Faktor Pendukungnya yaitu: (1) sumber dana tidak hanya dari pihak swasta saja namun juga berasal dari swadaya pihak swasta (2) memiliki kerabat atau kenalan hingga ke tingkat propinsi yang memudahkan LPM dalam mengajukan proposal.
 2. Faktor penghambatnya yaitu : (1) terbatasnya dana (2) kantor sekretariat LPM yang sudah tidak layak (3) tidak adanya fasilitas pendukung seperti komputer, printer, dan fasilitas pendukung lainnya.

Saran

1. Fungsi LPM dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat perlu di tingkatkan lagi dengan tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan dari pihak swasta saja, namun menggerakkan swadaya masyarakat agar permasalahan pembangunan dapat segera teratasi.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari pihak pemerintah dalam mengupayakan pengadaan kantor sekretariat LPM yang mana pada saat ini kantor sekretariat LPM yang posisi bangunannya jauh dari kantor Kelurahan dalam kondisi tidak layak untuk di jadikan kantor sekretariat, memberikan fasilitas pendukung LPM seperti komputer yang nantinya bisa meringankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan pembangunan, karena LPM merupakan mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Pihak LPM perlu lebih mengetahui permasalahan pembangunan di Kelurahan Rawa Makmur, khususnya di daerah - daerah yang belum tersentuh pembangunan dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya. Bandung: 2010.
- Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta : Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta..
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2008. Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Rencana, Strategi, dan Peluang. Jakarta : Erlangga.
- Nasution, Zulkarimen. 2009. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI.
- Patton, Adri. 2006. Manajemen Pengembangan Organisasi. Surabaya: Fajar Harapan.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Siagian, Sondang P., 2008. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Stateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dokumen – dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sumber Lain:

- Susetocahyo, R Bambang. 2013. "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan".
- Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, (Online), Volume1, No.1, (<http://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/view/20/18>, diakses pada tanggal 24 November 2015).